BAPPEDA KOTA TANGERANG	NOMOR SOP : SOP-KOTA TANGERANG-KOORDINASI-
	TANGGAL PEMBUATAN :
	TANGGAL REVISI
	TANGGAL EFEKTIF
	DISAHKAN OLEH : KEPALA BAPPEDA
	Ir. R.Sugihharto Achmad Bagdja, M.Si NIP. 19[illegible]1003
	NAMA SOP : RAPAT KOORDINASI LAPORAN AKUNTABILITASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKIASI PELAKSANA
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 4. PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 5. PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Minimal DIII, Diutamakan S1 atau S2 b. Menguasai Sistem Perencanaan daerah c. Menguasai sistem Keuangan Daerah d. Memahami dan menguasasi Komputer dan Aplikasi e. Menguasai Teknis oleh data ststistik dan spasial f. Pengalaman diperencanaan teknis
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 2. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 3. RPJMD 4. Kebijakan Kepala Daerah 5. Renstra OPD 6. Data Statistik Pembangunan Kota Tangerang 7. RKPD 8. Renja OPD 9. Alat Tulis Kantor 10. Komputer 11. Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	1. RPJMD memuat visi misi program Walikota/Wakil Walikota terpilih, berpedoman pada RPJP dan RTRW Kota, memperhatikan RPJMN Provinsi serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya 2. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi